

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok, Rajawali Pers.
- Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenada Media.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, Unpam Press.
- Djanus Djamin, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia.
- Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Malang, Setara Press.
- Irwansyah, Editor, Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Cet. 3, Ed. Revisi*, Yogyakarta, Mirra Buana Media.
- Lucky Adrianto, 2006, *Pengantar Penilaian Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut*, Bogor, IPB Press.
- Maradona, *Penegakan Hukum Lingkungan: Administrasi dan Pidana Dalam Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, Dan Studi Kasus*.
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Raihan, 2017, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, UIJ. Press.
- Ridwan H.R, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers.
- Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Pustaka Setia.
- S. Prajudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soejono dirdjosisworo, 1983, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung, Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.

- Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Victor M, Situmorang, Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Yusuf Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing.

Jurnal

- Andi Bau Inggit AR., *et.al.* (2017). Local Regulation Review In Realizes Legal Order Of The Local Governance. *Journal Of Law, Policy And Globalization*. Vol. 59.
- Andi Bau Inggit AR. (2021). Regional Regulations Review In Realizing Democratic Regional Government: A Conceptual Approach. *Awang long law review*. Vol 3. No. 2.
- Belvi Vatria. (2010). Berbagai Kegiatan Manusia Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai Serta Dampak Yang Ditimbulkannya. *Jurnal Belian*, Vol. 9. Nomor 1.
- Christiani Tanuari. (2020). Penambangan Pasir Laut yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. *Jurnal Education and Development*. Vol. 8. Nomor 3.
- Dinoroy Marganda Aritonang. (2014). Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. XI No. 3.
- Kartono. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9. Nomor 3.
- Marthen Arie. (2016). Pendekatan Legisprudence dalam Menilai Kualitas Peraturan Perundang-Undangan. *Harlev*. Vol. 2 Edisi 3.
- Nanin Trianawati Sugito, Dede Sugito. (2008). Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai. *Jurnal Geografi Gea*. Volume 8 No. 2.
- Zainab Ompu Jainah. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *Journal of Rural and Development*. Vol. 3. Nomor 2.

Skripsi

- Anggy Rahman. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- M. Fuad Budairi. 2019. *Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Suci Hajratul Aswad. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Pertambangan Pasir Laut Untuk Makassar New Port di Perairan Spermonde*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Yoyoan Kalumbang. 2021. *Pertambangan Pasir Laut Ilegal di Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya Kabupten Sumba Barat Ditinjau dari Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Skripsi. Universitas Nusa Cendana Kupang.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 862).

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113).

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 4).

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 Nomor 05).

Kamus

Qonita Alya. 2009. *Kamus Bahasa Indonesia*. PT. Indah Jaya Adipratama (Anggota IKAPI). Bandung.

Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth (9th) Edition, West Publishing Co, United States of America.

Internet

Bidik Online, *Lanal Bersama Satpol PP Nisel Peringati Mobil Pengambil Pasir*, <https://m.bidikonline.com/read-88028-2019-08-01-lanal-bersama-satpol-pp-nisel-peringati-mobil-pengambil-pasir.html>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022.

Direktorat Jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/38401-timbulkan-kerusakan-pesisir-kkp-proses-hukum-pelaku-penambangan-pasir-laut-di-pulau-rupat-riau>, diakses tanggal 28 Mei 2023.

Kabar Nias, *Stop Penggalan Pasir di Pantai Sorake dan Lagundri*, <https://kabarnias.com/featured/stop-penggalan-pasir-di-pantai-sorake-dan-lagundri-5939>, diakses pada tanggal 5 Maret 2022.

Badan Riset & SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agussalim, 2017, *Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut Secara Ekstraktif dan Non-Ekstraktif*, <https://www.bp3ambon-kkp.org/2017/01/30/pemanfaatan-sumberdaya-pesisir-dan-laut-secara-ekstraktif-dan-non-ekstraktif/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022.

Nias Satu, *Pemda Nias Selatan Tertibkan Penambangan Pasir di Pantai Sorake*, <http://niassatu.com/2016/05/24/pemda-nias-selatan-tertibkan-penambangan-pasir-di-pantai-sorake/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022.

Suara Nusantara, *Penertiban Pasir Ilegal di Nias Selatan Bagai Simalakama*, <https://suaranusantara.com/2017/02/09/penertiban-penambangan-pasir-ilegal-di-nias-selatan-bagai-simalakama/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2022.

Tim P3MN, *Dokumen Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Provinsi Sumut*, https://www.wetlands.or.id/PDF/aceh_Final_Dokumen%20Nias%20Bahasa_Version.pdf. diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

Walhi Riau, *Aktivitas Tambang Pasir Laut Menambah Ancaman Terhadap Pulau Rupat*, <https://www.walhi.or.id/walhi-riau-aktivitas-tambang-pasir-laut-menambah-ancaman-terhadap-pulau-rupat>, diakses tanggal 29 Mei 2023.

SUMBER LAIN

Wawancara

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

Nomor : 7336/UN4.5.3/PT.00/2022

Lampiran : -

Makassar, 25 Agustus 2022

H a l : **PENELITIAN**

Kepada

Yth. : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
di,-
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : NELVI ORYENTI SARUMAHA

No. Pokok : B021181026

No. HP : 081210064048

Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara

Alamat : JL.SETUJU, PONDOK SUDIRMAN

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta ,SH.,MH.,DFM
2. Dr. Andi Bau Inggit AR. ,SH., M.H.

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN PENGAMBILAN PASIR LAUT DI KABUPATEN NIAS SELATAN,
SUMATERA UTARA

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



Dr. Mun. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19810418 200212 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;





**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jln. Pasir Putih Komplek TPI - Teluk Dalam
Email : dkp.kabnisek@gmail.com

Kode Pos 22865

Teluk Dalam, 31 Oktober 2022

Nomor : 523/ 407 /DKP/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Bidang Kemahasiswaan,
Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
di
Makassar

Sehubungan dengan surat Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor : 7336/UN4.5.3/PT.00/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 Hal Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : Nelvi Oryenti Sarumaha
No. Pokok : B021181026
No. HP : 081210064048
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pengawasan Pengambilan Pasir Laut di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH., MH., DFM
2. Dr. Andi Bau Inggit AR, SH., MH

Telah Melaksanakan Penelitian/ Pengambilan Data dan Dokumen dari tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Nias Selatan,

SEKSAMA SARUMAHA, S.IP.,MA.
Pembina Utama Muda
NIP 19700416 198909 1 002

Tembusan:
1. Yth. Bupati Nias Selatan (sebagai laporan).
2. Arsip



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN BELAWAN**

Jl. Gabion Belawan – Medan 20414 Telepon (061) 6943047 Fax (061) 6943134
Email : psdkp.belawan@kkp.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 380 /PSDKPSta.2/TU.210/II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Edy Sutanto S.Pi**
NIP. : 19761222 200912 1 001
Pangkat/Golongan : Penata / III-c
Jabatan : Kepala Urusan Umum
Unit Kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : **Nelvi Oryenti Sarumaha**
NIM : B021181026
Fakultas/Prodi : Hukum / Hukum Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemanfaatan Pasir Laut Di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara

Telah melaksanakan wawancara dan pengambilan data pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, pada tanggal 1 s.d 8 Februari 2023.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Belawan, 8 Februari 2023

A.n Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan
Kepala Urusan Umum,



Edy Sutanto, S.Pi
NIP. 19761222 200912 1 001



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Seksama Sarumaha, S.IP., MA. selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan.



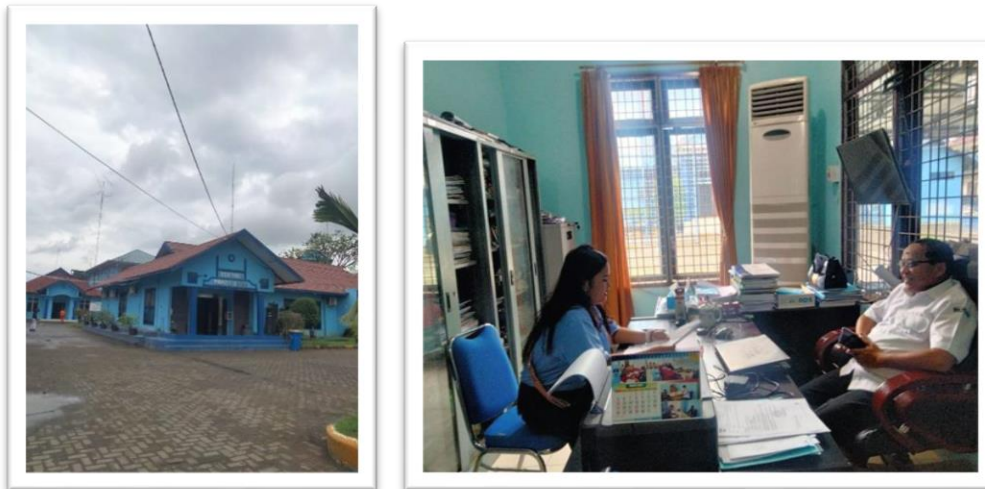
Gambar 2: Proses wawancara dengan Bapak Hartawan Halawa, S.PD selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan bersama dengan Sekretaris Dinas Bapak Samudra K. Zendrato, S.Sos., M.Si.



Gambar 3: Proses wawancara dengan Bapak Wiraswasman Telaumbanua, SS selaku Kasubbag Bagian Hukum dan Persidangan bersama dengan Bapak Deskarnial Zagoto, SE selaku Kasubbag Umum.



Gambar 4: wawancara dengan Bapak Dionisius wau, SE.,MM selaku Kepala Satpol PP dan Linmas Kabupaten Nias Selatan.



Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Edy Sutanto S.PI selaku Kepala urusan umum Polsus PWP3K kantor stasiun pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Belawan, Medan, Sumatera Utara.



Gambar 6: Wawancara dengan Bapak Arozaa Gowasa dan keluarga selaku masyarakat pemanfaat pasir laut di Pantai TPI Kabupaten Nias Selatan.